

Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang

Jessica Lofty Angelique^{1*}, Rethorika Berthanila¹, Ahmad Sururi¹
¹Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Serang Raya
Jl. Raya Cilegon KM 5 Taman Kota Serang 42162 Banten

*Email: jessicalofty2020@gmail.com

Naskah diterima 30 Agustus 2021, Revisi 20 September 2021, Terbit 29 Oktober 2021

DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10975

Abstract

The complexity of the problems, such as the uneven placement of water storage infrastructure, low public awareness of healthy living behavior, less than optimal socialization of the companion team, and weak coordination between DPOs are some of the problems that concern this study. The purpose of this study is to discuss how the implementation of the Sanimas Program in Kasemen District, Serang City and what the inhibiting factors are. The study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews with eight informants and data analysis through the data classification process (coding data), then the results of this data classification were made labels (labeling) and then the categories were arranged. The results showed that in general the implementation of the Sanimas Program in Kasemen District, Serang City was still not successful and running optimally. This is due to unequal access to clean water, lack of community involvement and the absence of local regulations. As for the inhibiting factors from an internal perspective, namely the inadequate quantity of human resources, a lack of coordination between interested parties, and from an external perspective, it includes the socio-cultural factors of society and the geographical conditions of the environment.

Key words: implementation, community based sanitation (sanimas), Serang city

PENDAHULUAN

Pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan membawa dampak dan konsekuensi pemenuhan kebutuhan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang layak dan memadai. Disisi lain sanitasi yang aman dan terjangkau merupakan fungsi sosial dan akses universal bagi masyarakat (UN-Habitat III, 2016). Dengan demikian penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana program Sanimas dalam analisis perspektif implementasi kebijakan.

Implementasi Sanimas sebagai salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah berupaya memberikan prioritas terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur sanitasi air terutama limbah domestik (Kemen PUPR Dirjen Cipta Karya, 2020). Hal tersebut sesuai dengan paradigma atau konsep pembangunan dengan mengutamakan masyarakat sebagai aktor utama atau subjek dan pelaku pembangunan tingkat lokal dalam upaya memberikan penguatan nilai dan

budaya yang berkembang di masyarakat (Sururi, 2015).

Sebagai subjek dan pelaku pembangunan Infrastruktur Sanimas, masyarakat membentuk organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai perwujudan partisipasi dan berperan aktif, dalam hal ini masyarakat didampingi oleh tenaga Fasilitator dari Provinsi dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan analisis situasi sosial, mengidentifikasi dan memastikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat tentang Sanimas dan melakukan tindak lanjut rencana kegiatan program Sanimas (Kemen PUPR Dirjen Cipta Karya, 2020)

Kecamatan Kasemen merupakan salah satu dari 6 (enam) kecamatan di Kota Serang yang memiliki luas wilayah 56,36 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 94.992 jiwa dengan komposisi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 49.817 jiwa dan 46.175 jiwa berjenis kelamin perempuan (BPS Kota Serang, 2019) dan pada saat ini sedang

melaksanakan program Sanimas. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan *gap* atau kesenjangan implementasi seperti tidak semua masyarakat di Kecamatan Kasemen dapat merasakan tujuan dan manfaat program ini. Padahal sebagaimana yang diungkapkan oleh (Nugroho D 2009: 494-495) bahwa secara lebih dan kurang, implementasi kebijakan merupakan suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Beberapa permasalahan seperti penempatan infrastruktur penampungan air yang belum merata menyebabkan masyarakat masih sulit memperoleh akses air bersih, masih rendahnya kesadaran masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dalam membangun dan mengelola sarana IPAL, sosialisasi oleh tim pendamping yang masih minim atau hanya sekali dilakukan pada saat awal program sanimas akan dilaksanakan, dan belum optimalnya koordinasi antara OPD terkait sehingga menghambat pelaporan kegiatan

Selanjutnya, sebagaimana yang dilansir dalam (Tim Pikiran Rakyat, 2020) disebutkan bahwa kepemilikan jamban di Kota Serang hanya sebesar 72,8% sedangkan sisanya tidak memiliki jamban atau masih melakukan BABS ditempat yang tidak semestinya seperti di sungai dan sawah.

Selain itu kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Kasemen Kota Serang seperti terjadinya kekeringan sumber air yang berasal dari sumur gali pada saat musim kemarau sehingga berdampak pada menurunnya derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Penelitian tentang Sanimas yang dilakukan oleh (Prayitno & Widati, 2018) mengatakan tujuan terpenting dari Sanimas adalah perubahan perilaku menjadi sehat dan ditegaskan dalam hasil penelitiannya bahwa capaian Sanimas masih belum optimal dengan indikasi belum adanya komitmen dan kebijakan yang tegas dari pemerintah kepada masyarakat yang masih membuang feses ke sungai atau tempat yang dilarang. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Chusniati, 2019) yang menyebutkan Program Pamsimas sudah berjalan optimal dan sesuai dengan pedoman teknis dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat, pelayanan

sanitasi yang efektif, ketersediaan infrastruktur sumber air minum yang memadai dan dukungan manajemen yang efektif dalam pelaksana program. Selain itu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan program seperti adanya metode pemberdayaan, pelatihan kreativitas dan inovasi masyarakat melalui pembentukan kerja kelompok, dan mekanisme kompromi serta komitmen di semua tingkatan.

Selanjutnya penelitian oleh (Adi & Rahdriawan, 2016) menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip implementasi program yang dilaksanakan berada pada tingkat pencapaian sebesar 80% dengan indikasi sudah terimplementasikannya tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi meskipun masih terdapat hambatan pada tahap pengorganisasian dan partisipasi yang berada pada kategori sedang, dalam hal ini masyarakat belum diberikan kesempatan secara penuh untuk melakukan pengambilan keputusan secara mandiri dikarenakan dominannya peran elit yaitu pihak kelurahan dan ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga sehingga mengakibatkan rendahnya respon dan antusias masyarakat. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sitra et al., 2019) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan optimal dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, sinergitas antara masyarakat dan pemerintah sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan program dan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Mustafidah et al., 2020) menyimpulkan belum optimalnya pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada pilar pertama yaitu untuk tidak membuang air besar sembarangan dan berada dalam kategori rendah dan infrastruktur yang masih belum menunjang, meskipun sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sudah baik dengan adanya penyuluhan dan pedoman dalam pelaksanaan program.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan dan secara umum

masih terdapat berbagai hambatan implementasi kebijakan dalam program Sanimas. Seperti yang ditegaskan oleh (Thomas & Grindle, 1990) bahwa dipelukan reformasi implementasi kebijakan setelah keputusan dibuat dan dilaksanakan dengan berbagai pendekatan interaktif. Oleh sebab itu dalam implementasi kebijakan Sanimas dengan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat maka perlu mendorong perencanaan partisipatif para memegang kekuasaan untuk membagi kekuasaannya dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya menjadi sangat penting untuk mengurangi peran dalam mengontrol masyarakat (Widianingsih, 2005).

Konsep program Sanimas hendaknya mampu memberikan posisi tawar kepada masyarakat secara optimal merupakan salah satu preferensi implementasi kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Wu et al., 2015) yang melihat kapasitas organisasi dan individu merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dan meminimalkan kegagalan implementasi kebijakan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan; kurangnya kemampuan dan kompetensi; dan kurangnya keinginan (Frawley, 1977) dalam (Marume et al., 2016).

Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan implementasi program Sanimas dianalisis menurut pendapat (Van Meter & Van Horn, 1975), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok baik dari sektor publik maupun swasta sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan disepakati dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan terdiri dari : (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) keterlibatan sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap/kecenderungan dari para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana implementasi program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan faktor-faktor penghambatnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini dipilih untuk memahami fenomena sosial yang kompleks melalui pertanyaan penelitian utama yaitu dinamika kebijakan (Yin, 2014). Penelitian ini secara khusus dilakukan untuk memperoleh pemahaman bagaimana implementasi program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan apa faktor pendukung serta penghambatnya. Proses ini dianggap sebagai konstruksi sosial para pemangku kepentingan dalam dinamika dan implementasi program sanimas di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Dan pendekatan interaksi tersebut tidak dapat dieksplorasi dengan menggunakan instrumen survei (Merriam, 2013).

HASIL PEMBAHASAN

Peneliti melakukan proses penelitian melalui wawancara terkait dengan kejelasan standard dan tujuan program Sanimas di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sebagaimana dikemukakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) bahwa ukuran dan tujuan kebijakan harus mengindikasikan adanya kejelasan dan keterukuran pada standard dan sasaran kebijakan sehingga dapat diimplementasikan. Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa program Sanimas bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait akses sanitasi yang berkualitas sesuai dengan program RPJMN 100-0-100 disertai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga pencemaran tanah akibat BABS dapat di minimalisir. Adapun salah satu upaya nyata adalah dengan dibangunnya IPAL seperti di Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang. Program Sanimas di Kecamatan Kasemen Kota Serang bertujuan memberikan bantuan berupa infrastuktur sanitasi yang memiliki kualitas dan sebagai komitmen pemerintah.

Keberhasilan implementasi program Sanimas ditentukan oleh ketersediaan dan kemampuan memanfaatkan sumberdaya. Pertama adalah sumberdaya manusia, dimana dalam proses pelaksanaan program Sanimas di Kecamatan Kasemen Kota Serang unsur sumberdaya manusia yang memiliki peran penting adalah pendamping karena bertugas mendampingi masyarakat

pada awal program akan diimplementasikan, pada saat implementasi dan evaluasi. Hasil wawancara menerangkan bahwa jumlah pendamping yang memiliki peran penting dalam pemecuan masih jauh dari kata memadai sehingga menyulitkannya untuk menjalankan program Sanimas.

Dimensi agen pelaksana menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan dengan mendorong partisipasi dan keterlibatan organisasi formal dan informal. Meskipun demikian dalam implementasi program Sanimas masih menemui permasalahan kurangnya peran agen pelaksana terutama komunikasi kepada masyarakat.

Keberhasilan dan kegagalan program Sanimas dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal meliputi kondisi ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu kemampuan dari setiap pelaksana program untuk memastikan kondusifitas lingkungan seperti kondisi masyarakat menjadi sangat penting agar implementasi program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan internal yaitu masih minimnya sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program, dalam hal ini masyarakat yang aktif hanya sebagian besar berasal dari kampung yang menjadi titik IPAL saja.

Berdasarkan hasil wawancara juga menggambarkan bahwa dari faktor internal seperti sumberdaya manusia masih belum memadai selain itu masyarakat sebagai basis dari program masih kurang keterlibatannya. Selain itu masih terdapat hambatan eksternal yaitu faktor kebiasaan masyarakat yang tidak bisa melepaskan kebiasaan membuang air besar di tempat-tempat yang dapat mengganggu kesehatan dan faktor geografis wilayah yang menyulitkan pencarian lokasi untuk menampung air bersih.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan baik tenaga kerja maupun iuran uang. Hal tersebut menggambarkan bahwa sumberdaya program Sanimas baik sumberdaya manusia, finansial, secara keseluruhan belum berjalan dengan optimal dari segi sumberdaya manusia yang belum memadai. Program Sanimas ini masih

memiliki kendala dalam hal pembagian tugas pendamping yang masih rangkap, sehingga sumberdaya manusia yang ada tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena masih ada beberapa pendamping yang merasa bebannya lebih besar dengan pendamping yang lain.

Analisis Hasil Implementasi

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi program Sanimas di Kecamatan Kasemen Kota Serang berdasarkan aspek ukuran dan tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik dimana program Sanimas memiliki tujuan yang jelas dan menjadi komitmen pemerintah dengan pembangunan infrastruktur sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian melalui wawancara juga menggambarkan bahwa implementasi program Sanimas di Kecamatan Kasemen sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu pembangunan IPAL pada masyarakat berpenghasilan rendah di permukiman padat penduduk dan sanitasi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh (Sabatier & Mazmanian, 1979) yang mengatakan bahwa kemampuan kebijakan hendaknya mampu menstruktur proses implementasi berisikan kejelasan dan konsistensi tujuan. Kemudian jika dikonfirmasi dengan (Grindle, 2017) yang mengatakan bahwa dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan maka ukuran dan tujuan kebijakan harus ditetapkan secara cermat dan tepat terlebih dahulu di awal perencanaan kebijakan.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya partisipasi perencanaan sebagaimana dikemukakan oleh (Widianingsih, 2005) yang mengatakan bahwa partisipasi perencanaan merupakan dimensi penting untuk mengurangi konflik antar stakeholder sehingga menurut (Anderson, 1979) agar implementasi berjalan efektif perlu menganalisis 4 (empat) aspek, yaitu siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, sifat proses administrasi, kepatuhan terhadap kebijakan, dan pengaruh penerapan terhadap isi dan dampak kebijakan. Keempat aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana yang oleh

Anderson disebut *administrative unit*, yaitu unsur yang terdiri dari aparatur birokrasi publik dari level atas sampai level bawah. Agar implementasi dapat berlangsung efektif perlu adanya kepatuhan dari implementator. Untuk itu, diperlukan standarisasi proses administrasi berupa standar operasional prosedur (SOP).

Sumberdaya

Pada implementasi program Sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kasemen menggambarkan bahwa dari segi kondisi sumberdaya manusia sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan secara kuantitas belum memadai dimana program Sanimas ini masih memiliki kendala dalam hal pembagian tugas pendamping yang masih rangkap sehingga sumberdaya manusia yang ada tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena masih ada beberapa pendamping yang merasa bebannya lebih besar dengan pendamping yang lain. Hal ini terkait erat dengan kapasitas kebijakan yang dimaknai sebagai kemampuan memetakan dan memberikan arahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang bersifat kompleksitas dan saling terkait, tata kelola berbasis multi-level, beberapa garis kesalahan dan pengaturan multi-organisasi, masalah lintas sektoral, jaringan kebijakan, antar keterkaitan dan ketergantungan organisasi (Parsons, 2004).

Sedangkan secara kualitas, sumberdaya manusia dapat melakukan tugasnya dengan baik karena dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat dilapangan. Hanya saja masih banyak masyarakat yang belum terlibat langsung dalam kegiatan. Adapun terkait sumberdaya finansial, letak keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pelaksana program untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan anggaran agar tidak menghambat proses pencapaian tujuan kebijakan. Terkait dengan hal tersebut, pemanfaatan sumber daya dalam implementasi program bersifat strategis untuk memecahkan masalah-masalah publik (Carley, 1983) dalam (Fischer et al., 2007). Hal ini dikarenakan menurut (Edward III, 1980) *resources* berkenaan dengan ketersediaan berbagai sumber daya

pendukung terutama sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam terwujudnya tujuan implementasi kebijakan. Kemudian hasil penelitian tersebut jika dikonfirmasi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zahrina et al., 2015) bahwa implementasi program Sanimas telah dilaksanakan secara maksimal melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat dan adanya sumber daya manusia yang professional

Karakteristik Agen Pelaksana

Pada karakteristik agen pelaksana belum berjalan dengan baik dimana masih terdapat kendala dilapangan seperti kurangnya dukungan dari pihak terkait dalam hal ini yang terpenting dari masyarakat karena basis dari program ini adalah masyarakat hal ini disebabkan juga komunikasi dan pemahaman yang masih kurang. Selain itu masih belum meratanya pembangunan penampungan air sehingga warga masih sulit memperoleh akses air bersih. Pola perilaku masyarakat sangat menentukan perubahan derajat kesehatan di Kecamatan Kasemen. Bahwa kapasitas kebijakan yang dimiliki oleh sumber daya manusia merupakan rangkaian yang terdiri dari keterampilan dan sumber daya, kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kebijakan (Gleeson et al., 2011; Gleeson et al., 2009) akan memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam keberhasilan kebijakan.

Hasil penelitian jika dikonfirmasi dengan hasil penelitian Chusniati, (2019) yang mengemukakan pentingnya komitmen seluruh pihak mendukung keberhasilan implementasi program Sanimas. Sehingga menurut Wu et al (2015) karakteristik agen pelaksana dalam program Sanimas membutuhkan skill dan kompetensi yang meliputi analisis, dan operasional yang memadai. Ditegaskan oleh (Marume et al., 2016) bahwa karakteristik agen pelaksana merupakan referensi penting keberhasilan kebijakan yang efektif.

Sikap/Kecenderungan Pelaksana

Terkait sikap pelaksana dalam menjalankan program sanimas dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik, karena implementor Sanimas sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam berusaha mengajak masyarakat mengubah perilaku dan kebiasaannya yang kurang baik yang artinya

implementor tugas Sanimas sudah tanggung jawab atas tugasnya. Menurut (Van Meter & Van Horn, 1975), tiga elemen respon pelaksana dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan yang meliputi pemahaman tentang kebijakan, arah tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitasnya. Sehingga intensitas disposisi pelaksana memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kinerja kebijakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan sosialisasi kepada masyarakat masih belum menyeluruh melibatkan masyarakat dan belum dilaksanakan secara rutin dimana dilakukan hanya sebelum pendirian IPAL. Terkait hal ini mendorong peran masyarakat untuk berpartisipasi dan memposisikan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator penting untuk dilakukan (Sitra et al., 2019) sehingga sikap pelaksana yang memiliki komitmen (Chusniati, 2019) dalam implementasi program dapat terus ditingkatkan.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Melihat kondisi dilapangan mengenai cara komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa proses komunikasi terutama koordinasi belum berjalan secara optimal dan hal ini menyebabkan terjadinya hambatan pada aspek sosialisasi tujuan dan sasaran program kepada masyarakat, selain itu belum adanya perda yang mengatur dan mengikat OPD terkait untuk ikut bergabung sehingga ketika pelaksanaan pembangunan OPD terkait tidak mengetahui informasi yang jelas kapan pelaksanaannya. Menurut Edwards dan Sharkansky (1978) dalam (Marume et al., 2016) menyatakan bahwa syarat dalam efektifitas implementasi adalah tanggung jawab dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan sekaligus mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu penerapan kebijakan harus konsisten, jelas, dan akurat dalam menentukan tujuan pembuat keputusan. Dengan demikian koordinasi antar stakeholder dapat terus meningkat.

Permasalahan koordinasi yang masih minim dapat dikonfirmasi dari pendapat (Marume et al., 2016) yang mengatakan pentingnya hal-hal sebagai berikut: 1) transmisi; 2) kejelasan; 3) konsistensi; dan

ditegaskan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) pentingnya proses komunikasi kinerja kebijakan ditransmisikan kepada pelaksana dengan jelas, akurat, konsisten, dan tepat waktu.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi program Sanimas masih menemui berbagai tantangan dan hambatan. Menurut (Sabatier & Mazmanian, 1979) variabel-variabel seperti (1) karakteristik masalah; (2) karakteristik kebijakan; dan (3) variabel lingkungan merupakan beberapa faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: *Pertama*, karakteristik masalah yang sedang dilakukan penanganan. Setiap persoalan yang dihadapi oleh suatu kebijakan memiliki derajat kebebasan yang berbeda. Ada suatu persoalan dalam derajat mudah, sedang dan sulit. Semakin mudah persoalan yang dihadapi oleh suatu kebijakan, maka akan semakin tinggi kemungkinan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. *Kedua*, karakteristik kebijakan. Suatu kebijakan agar berhasil diimplementasikan juga dipengaruhi oleh sifat-sifat kebijakan itu, seperti : menyangkut kejelasan kebijakan, dukungan teoritis, alokasi sumberdaya, dukungan institusi, konsistensi aturan, maupun komitmen. *Ketiga*, variabel lingkungan kebijakan berupa faktor-faktor yang berada di luar kebijakan. Faktor-faktor tersebut seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan dukungan publik.

Kemudian dari kondisi sosial lingkungan dalam implementasi kebijakan program Sanimas secara keseluruhan masyarakat mendukung jalannya program Sanimas meskipun untuk keterlibatan secara langsung masih dikatakan kurang. Adapun kondisi politik lingkungan dalam implementasi program Sanimas di Kecamatan Kasemen Kota Serang menggambarkan bahwa Sanimas adalah program yang memang mendasar dimana merupakan program untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk, kumuh, miskin dan rawan sanitasi di perkotaan.

Faktor Penghambat

Faktor-faktor internal yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Sanimas di Kecamatan Kasemen meliputi minimnya keterlibatan masyarakat, indikasi tersebut dapat dilihat dari implementasi program hanya dilakukan pada beberapa kampung yang menjadi titik IPAL saja, tenaga pendamping belum memadai sehingga membuat beberapa pendamping memiliki tugas rangkap yang berpengaruh penyusunan pelaporan, pembangunan IPAL yang belum merata di Kecamatan Kasemen sehingga warga sulit memperoleh akses air bersih, kemudian belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas koordinasi antar OPD, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang masih belum efektif seperti pada sosialisasi yang dilakukan masih kurang.

Beberapa faktor penghambat tersebut memerlukan penanganan solusi yang intensif seperti strategi berupa pemberian sanksi kepada pelaku BABS, penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat serta komitmen untuk membangun instalasi air limbah komunal (Prayitno & Widati, 2018). Selain itu mendorong kolaborasi antar aktor dalam implementasi kebijakan seperti program Sanimas menjadi dimensi penting (Sururi, 2020) selain hambatan faktor eksternal seperti sosial kultural, dan kondisi geografis wilayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang masih belum berhasil dan berjalan optimal. Meskipun ketersediaan infrastruktur sanitasi yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sudah sesuai dengan kebutuhan telah dilaksanakan sesuai sasaran yaitu pada daerah Kabupaten/Kota; Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rawan sanitasi. Namun berbagai temuan dilapangan menggambarkan bahwa implementasi program Sanimas belum berjalan dengan baik karena belum meratanya akses air bersih bagi seluruh masyarakat di Kasemen, minimnya peran serta masyarakat secara langsung dalam melaksanakan program, kurang koordinasi dinas atau OPD terkait dan juga belum

adanya peraturan daerah yang secara tegas mengikat OPD terkait untuk ikut bergabung sehingga dalam hal pembagian tugas pendamping ada yang masih rangkap membuat sumberdaya manusia yang ada tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena masih ada beberapa pendamping yang merasa bebannya lebih besar dengan pendamping yang lain.

Kemudian faktor penghambat internal dalam implementasi Program Sanimas di Kecamatan Kasemen Kota Serang meliputi minimnya keterlibatan masyarakat, , tenaga pendamping belum memadai, pembangunan IPAL yang belum merata di Kecamatan Kasemen, belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas koordinasi antar OPD dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang masih belum efektif. Sedangkan hambatan faktor eksternal meliputi faktor sosial kultural, dan kondisi geografis wilayah.

Dari simpulan yang telah dijelaskan di atas, saran dan rekomendasi yang diusulkan oleh peneliti antara lain: 1) masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun serta dapat memanfaatkan fasilitas dengan baik dan optimal guna menunjang kebutuhan sehari-hari; 2) menambah sumberdaya manusia dari pendamping agar tidak ada pendamping yang rangkap tugas dan tanggungjawab; 3) mendorong pemicuan secara berkelanjutan; 4) melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat, sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat bisa mengetahui dan mengerti program Sanimas yang dilaksanakan oleh pemerintah itu seperti apa dan untuk apa. Sosialisasi ini dapat dilakukan pada saat pertemuan besar dimana masyarakat sasaran, perwakilan organisasi dan perkumpulan masyarakat berkumpul. Agar dapat menjangkau masyarakat sebanyak mungkin, kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, atau dengan "menumpang" pada acara lain, seperti arisan, pengajian atau pertemuan-pertemuan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. K., & Rahdriawan, M. (2016). Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PBSM) di Kelurahan

- Mangunharjo, Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(2), 151. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.2.151-159>
- Anderson, J. (1979). *Public Policy Making (Second ed)*. Holt, Rinehart and Winston.
- Chusniati, S. (2019). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 57–64. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2.216>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*.
- Gleeson, D. H., Legge, D. G., & O'Neill, D. (2009). Evaluating health policy capacity: Learning from international and Australian experience. *Australia and New Zealand Health Policy*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/1743-8462-6-3>
- Gleeson, D., Legge, D., O'Neill, D., & Pfeffer, M. (2011). Negotiating tensions in developing organizational policy capacity: Comparative lessons to be drawn. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 13(3), 237–263. <https://doi.org/10.1080/13876988.2011.565912>
- Grindle, M. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. In *Princeton Legacy Library* (2017th ed.).
- Marume, S. B. M., Mutongi, C., & Madziyire, N. C. (2016). An Analysis of Public Policy Implementation. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(4), 86–93. <https://doi.org/10.9790/487X-1804018693>
- Merriam, S. B. (2013). Qualitative Research A Guide to Design and Implementation. Revised and Expanded from Qualitative Research and Case Study Application in Education. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2004). Not just steering but weaving: Relevant knowledge and the craft of building policy capacity and coherence. *Australian Journal of Public Administration*, 63(1), 43–57. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2004.00358.x>
- Prayitno, J., & Widati, S. (2018). Kajian Strategi Promosi Kesehatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kota Surabaya. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(3), 267–274. <https://ejournal.unair.ac.id/JKL/article/download/6481/5774>
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1979). *Conceptual Framework, The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis*.
- Sitra, E., Agustar, A., & Erwin. (2019). Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) dan Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jispo*, 9(1), 344–355.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Sururi, A. (2020). Collaborative Governance Actor in the Revitalization Program of Old Banten Religious Tourism Area. *Policy & Governance Review*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i2.216>
- Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the Decision: Reforms Implementing Policy in Developing Countries. *World Development*, 18(8), 1163–1990.
- Tim Pikiran Rakyat. (2020, March 21). 27,20 Persen Warga Kota Serang Masih Dolbon. *Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01308606/2720-persen-warga-kota-serang-masih-dolbon> (Diakses pada 08 April 2020)
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration &*

- Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widianingsih, I. (2005). Network of Asia-Pacific Schools and Institutes of Public Administration and Governance (NAPSIPAG) Annual Conference 2005 Beijing, PRC, 5-7 December 2005 Workshop on Enlarging Citizen Participation and Increasing Local Autonomy in Achieving Societal Harmon. *Workshop on Enlarging Citizen Participation and Increasing Local Autonomy in Achieving Societal Harmony Workshop*.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171.
<https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: design and methods* (Fifth Edit). SAGE Publications Inc.
- Zahrina, A. F., Suryadi, & Suwondo. (2015). Implementasi Program Gerakan Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan (Studi Kasus pada Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1832–1836.